

# MENUJU JURUSAN PMI YANG CERDAS DAN BERKELAS

Agus Ahmad Safei

## Pembuka:

### Ke Arah Ilmu Dakwah yang 'Bebas Derita'

Dalam konteks pengembangan ilmu, boleh jadi, ilmu dakwah merupakan disiplin yang paling 'menderita' di antara disiplin-disiplin lain yang ada. Alasannya, menurut saya, sangat sederhana. Sebagai disiplin baru, ilmu dakwah tidak atau belum memiliki tradisi keilmuan yang mapan dibanding disiplin-disiplin lain -- bahkan pun dibanding rekan-rekannya 'sesama' ilmu agama. Dengan agak sinis sebagian orang bertanya-tanya: *bagaimana ceritanya dakwah bisa dikatakan sebagai disiplin ilmu mandiri?* Inilah satu dari sekian banyak tantangan paling *muhim* yang harus dijawab oleh para 'fungsionaris' Fakultas Dakwah (dan Komunikasi).

Di sisi lain, justru ketiadaan pengalaman yang mapan dalam tradisi keilmuan ini menjadikan ilmu dakwah sebagai disiplin yang paling *challenging*. Ia menjadi 'sesuatu' yang leluasa untuk diutak-atik sedemikian rupa, disorong ke sana, ditarik ke mari. Dan, menurut saya, ini adalah lahan dan tantangan paling menjanjikan bagi *community of researchers*, yakni dosen-dosen Fakultas Dakwah sendiri. Mereka leluasa untuk 'berijtihad': hendak dijadikan dan dibawa ke mana ilmu dakwah ini.

Sekedar untuk 'menghibur diri', ketidakmapanan dalam tradisi keilmuan dakwah ini, menurut saya, justru harus disyukuri. Kemapanan sebuah ilmu,

acapkali membawa efek klenik yang sangat mengerikan. Pada disiplin-disiplin yang sudah dianggap mapan, ilmu sering tidak lagi dianggap sebagai sebuah perjalanan dan proses, melainkan sabda dan otoritas. Akhirnya, ilmu menjelma menjadi berhala. Dan itulah yang ingin saya sebut sebagai klenik. Sebagai disiplin baru, ilmu dakwah, untuk sementara, 'selamat' dari ancaman takhayul semacam itu.

Pada wilayah lain, ketiadaan tradisi keilmuan dakwah yang panjang dan matang, juga membuat ia leluasa untuk meminjam ilmu-ilmu lain yang sudah ada dan mapan untuk dijadikan sebagai ilmu bantu dakwah. Sebagai misal, ilmu-ilmu sosial yang sudah mapan, seperti sosiologi, komunikasi, dan psikologi 'diminta bantuannya' untuk memperkokoh posisi dakwah sebagai ilmu.

Pada wilayah yang lain lagi, ketiadaan tradisi keilmuan yang mapan tadi, juga sering memunculkan ibarat kalau ilmu dakwah ini bagai hutan belantara gelap yang amat menyeramkan. Ia adalah belukar lebat yang menunggu sentuhan tangan-tangan 'dingin' dan terampil untuk mengubahnya menjadi taman yang rindang dan menyenangkan.

Belakangan, kita menyaksikan dengan hati berdebar, satu per satu muncul karya-karya berkenaan dengan ilmu dakwah yang ditulis oleh dosen-dosen Fakultas Dakwah. Meskipun—bagi

sebagian (besar) dosen Fakultas Dakwah—menulis adalah sebuah ‘pekerjaan mahal dan ruwet’, namun tetap saja dari hari ke hari kita menyaksikan satu per satu ‘karya dakwah’ lahir dari dosen-dosen kreatif yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah. Karya-karya itulah yang pada akhirnya akan meneguhkan keberadaan dakwah sebagai ilmu.

Dalam suatu diskusi personal belum lama berselang, saya diingatkan oleh Profesor Amien Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga, bahwa hanya dengan karya-karya ilmiah itulah kita (komunitas ilmiah Fakultas Dakwah) akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ‘miring’ tentang ilmu dakwah ini. Menurut Amien lagi, dengan karya-karya inilah, pertanyaan *apakah dakwah merupakan sebuah ilmu yang mandiri*, dengan sendirinya akan *out of date*, tidak relevan, dan bahkan salah alamat.

Menurut hemat saya, dalam kerangka menjawab keragu-raguan (atau mungkin, tepatnya, ketidaktahuan) orang tentang keilmuan dakwah inilah, kita bisa memposisikan seminar dan lokakarya pengembangan keilmuan dakwah ini. Momen ini akan menjadi lahan yang amat menantang bagi siapa saja yang mempunyai komitmen untuk meneguhkan keberadaan dakwah sebagai ilmu melalui eksplorasi gagasan tentangnya. Dan, eksplorasi-eksplorasi gagasan dalam bentuk karya tulis inilah yang, menurut saya, akan membebaskan ilmu dakwah dari stigma publik sebagai ilmu yang tak jelas ‘juntrungannya’. Sekaligus juga akan menyvetop ‘gunjingan’ banyak mulut usil yang menyebut Fakultas Dakwah (sebagai ‘rumah’ ilmu dakwah) sebagai fakultas banyak cakap.

*48 Jurnal Ilmiah dan Profesi Dakwah*

Secara lebih jauh, tulisan ini akan mencoba memberikan perspektif tentang jasad dan arah kecenderungan Jurusan Pengembang Masyarakat Islam sebagai penguatan Fakultas Dakwah.

### **Kelahiran yang Dicitakan**

Salah satu ciri terpenting dari fenomena IAIN/UIN adalah munculnya berbagai program studi (prodi) baru. Tentu saja, Prodi itu dibuka untuk melengkapi sosok Perguruan Tinggi Islam (PTI) ini agar dihitung sebagai lembaga pendidikan tinggi yang tetap mampu membaca ruh zaman dan kehidupan (*zeitgeist*). Sebab, kehadiran perguruan tinggi dalam sebuah komunitas bukan saja dimaksudkan untuk mengembangkan sebuah ilmu sebagai sebuah mimpi, tetapi sekaligus ilmu sebagai alat untuk melakukan transformasi masyarakat -- lebih dari sekedar imajinasi.

Suatu program studi, atau biasa juga disebut sebagai jurusan, memang seharusnya dibangun di atas kerangka paradigma keilmuan yang jelas. Bukan hanya didasarkan pada “hawa nafsu” untuk memperbanyak mahasiswa atau pun membuka lebih luas kesempatan untuk belajar. Ia harus didasarkan pada perangkat pengembangan ilmu yang, salah satu faktor pendukungnya adalah, harus jelas referensinya. Sehingga, suatu program studi akan terlihat hidup dan dirasakan hidup oleh kehidupan, baik kehidupan akademik maupun kehidupan sosial.

Program studi atau Jurusan PMI idealnya menjadi salah satu institusi ilmiah yang mampu membaca tanda-tanda kehidupan yang saat ini tengah dililit berbagai problema. Menu apa yang bisa disajikan PMI untuk masyarakat

Indonesia, atau sekurang-kurangnya masyarakat lokal yang paling dekat bersentuhan dengan institusi perguruan tinggi; jasa akademik apa yang bisa ditawarkan kepada masyarakat yang mungkin sedang sakit seperti sekarang ini; atau formula apa yang telah berhasil dirumuskan untuk ikut memberikan solusi bagi pemecahan berbagai masalah kehidupan yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.

Salah satu tangga penopang paling penting dari ajegnya ilmu dakwah yang dicita-citakan adalah mapannya subkeilmuan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Sudah selayaknya Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) menjadi jurusan yang berkelas, dewasa dan bermartabat. Dan itu, menurut saya, hanya mungkin bisa dicapai dengan lahirnya referensi-referensi yang berkenaan dengannya. Saya yakin sepenuhnya, melalui serangkaian langkah yang *by design*, *by target* dan memasa depan, obsesi untuk menjadikan PMI sebagai jurusan yang berkelas, dewasa dan bermartabat akan bisa diwujudkan. Tentu saja, melahirkan karya tulis, apalagi dalam bentuk buku, bukan pekerjaan gampang dan sebentar. Ia membutuhkan stamina fisik, mental, serta intelektual yang spartan dan prima. Karena itulah, cita-cita untuk menampilkan sosok Jurusan PMI yang dewasa dan berkelas tidak hanya sebagai sebuah kerja budaya, tetapi, terutama, adalah kerja peradaban.

Jurusan PMI merupakan salah satu program studi yang ada dan bernaung di Fakultas Dakwah. Ia memusatkan kajiannya pada dakwah *bi ahsani amal* berupa *tathwir* (*community development*),

bukan pada dakwah *bi al-qawl*. Jurusan PMI mengembangkan ilmu *community development* dengan pendekatan wahyu (*istimbath*), interdisipliner (*iqtibas*), dan kajian sosial (*istiqla*). Jurusan PMI sama sekali tidak mengakui adanya dikotomi ilmu agama-ilmu umum, melainkan justru memandang ilmu-ilmu tersebut sebagai suatu entitas yang *integrated* dan *integral*.

Dengan demikian, jurusan PMI mencoba mencetak sarjana dakwah pengembangan masyarakat yang beriman, modern, berdaya saing tinggi, memiliki bekal *entrepreneurial mind set* yang baik, cerdas secara intelektual, cerah secara spiritual, sejahtera secara material, serta saleh secara sosial. Al-Qur'an punya istilah yang bagus untuk menggambarkan sosok demikian: *bastha'an fi al-ilmu wa al-jismi*, tangguh secara fisik dan mumpuni secara ilmu. Atau, dalam istilah Sunda, disebut sebagai pribadi yang *cageur*, *bageur*, *bener*, *singer*, *tur pinter*.

Karena itu, sarjana PMI diproyeksikan untuk menjadi ahli dakwah bidang pengembangan sumber daya manusia, sumberdaya lingkungan, dan sumberdaya ekonomi.

Untuk mewujudkan hal demikian, maka Jurusan PMI memiliki fokus sasaran untuk: *pertama*, terus-menerus melakukan studi baru tentang *community development*, baik sebagai ilmu maupun sebagai aktivitas manusia, untuk merumuskan konsep-konsep baru pada bidang *community development*. *Kedua*, melakukan studi atau riset tentang *community development* untuk menemukan relevansi dan nilai daya-guna fungsional *community development*. *Ketiga*, menyiapkan tenaga sarjana

profesional dalam bidang *community development* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pengembangan masyarakat dan kelembagaan Islam.

Dengan paparan sederhana di atas, maka tujuan Jurusan PMI dapat dirumuskan sebagai mendidik calon cendekiawan muslim yang berakidah Islam, berfikirah Islami, dan berakhlak mulia yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam *community development* (lihat, misalnya, QS 2:179,197,269; 3:7, 190; 5:100; 12:111; 13:19; 14:52; 38:29, 43; 39:9, 18, 21; 40:54; 65:10).

Selain tujuan teologis di atas, Program Studi PMI juga bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang *community development* dengan kualifikasi:

1. berperilaku terpuji serta mempunyai kesadaran bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat;
2. bersikap terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu, serta masalah-masalah kemasyarakatan, khususnya dalam bidang *community development*;
3. menguasai dasar-dasar metode ilmiah sehingga mampu mengembangkan ilmu dakwah bidang *community development*;
4. memiliki keahlian dasar dalam memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah-masalah sosial keumatan;
5. memahami asas-asas pengelolaan dan mampu memangku posisi-posisi sesuai dengan keahlian *community development* dalam

kegiatan produktif dan pelayanan publik.

Secara praksis-fungsional, para alumni Jurusan PMI dapat diproyeksikan untuk menduduki posisi-posisi sejarah sebagai:

1. ilmuwan dakwah (dosen, peneliti, analis sosial);
2. pekerja pada instansi pemerintah yang melaksanakan pembangunan dengan menggunakan pendekatan *community development* dan manajemen partisipatif;
3. tenaga profesional dalam pengembangan masyarakat sebagai konsultan, staf ahli, atau tenaga pendamping pembangunan;
4. tenaga lembaga swadaya masyarakat bidang *community development*
5. perencana dan tenaga lapangan perbaikan lingkungan pemukiman kota-kota dan perkampungan;
6. tenaga pemberdayaan ekonomi umat;
7. pengembang sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya lingkungan pada berbagai lembaga industri, lembaga ekonomi, lembaga politik, perusahaan/korporasi, resor wisata, dan pusat-pusat pelayanan publik lainnya.

#### Peluang untuk Berkembang

Para pengamat teknologi informasi selalu mengatakan, bahwa kini kita tengah memasuki sebuah era yang terus berubah dengan kecepatan yang nyaris tak tertanggungkan. Inilah yang oleh para ahli tadi disebut era teknologi, era *chips* dan komputer, era kompetisi, era SDM, era manajemen, era pemasaran

(*marketing era*), dan era perubahan paradigma kehidupan.

Paradigma pandangan dunia ilmiah modern kini terus mengalami pergeseran; paradigma positivisme yang hegemonik-kuantitatif terus digeser oleh paradigma pascapositivisme; kaum Newtonian dan Comtian yang meyakini kepastian, bukan probabilitas, terus dibabat oleh kaum spiritualis dan perenialis. Bagi kaum spiritualis dan perenialis, alam itu bukan *big clock*, tidak bisa diprediksi.

Perubahan pandangan dunia ilmiah di atas pada gilirannya telah menyebabkan perubahan paradigma kehidupan. Sebagaimana ditengarai oleh Denis Waitley dalam *Empires of The Mind* maupun oleh Taufik Bahaudin dalam *Brainware Management*, kekuatan kini tengah berubah dari sumber daya alam kepada pengetahuan; hierarki kepada sinergi; kontrol kepada pemberdayaan dan bimbingan; keutamaan pemegang saham kepada pelanggan; subordinasi karyawan kepada supraordinasi keputusan bersama; senioritas kepada kreativitas; produksi kepada kualitas; persaingan kepada pelanggan; keuntungan kepada integritas.

Pada gilirannya, perubahan yang terjadi di atas mendesak tuntutan perubahan pada paradigma pendidikan. Terutama ketika persaingan global itu pada hakikatnya adalah persaingan sumber daya manusia, maka lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi seperti IAIN/UIN, sangat dituntut untuk memberikan *strategic response* dalam menghadapi tuntutan-tuntutan perubahan tersebut.

Sebagai sebuah subsistem kehidupan kebangsaan, pendidikan akan berubah dengan berubahnya sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai akibat dari perubahan tatanan sosial-politik. Untuk kasus sekarang, sistem pendidikan akan mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Hal itu terjadi sebagai konsekuensi logis dari telah lahirnya keyakinan-keyakinan baru, kesadaran-kesadaran baru, kecerdasan-kecerdasan baru, teknologi-teknologi baru (termasuk teknologi-teknologi sosial), keterampilan-keterampilan baru, yang pada tingkat praksis dipicu oleh krisis ekonomi dan kisis sosial-politik; pada tingkat paradigmatis dan epistemologis-metodologis oleh krisis positivisme; pada tingkat etik oleh moralitas dan spiritualitas; dan pada tingkat peradaban dan kebudayaan oleh krisis kemanusiaan dan lingkungan.

Sejak hampir delapan tahun yang lalu (1998), kita memasuki babak baru yang disebut oleh banyak orang sebagai era reformasi. Kebijakan-kebijakan sosial-politik perlahan-lahan berubah dari corak yang sentralistik menjadi corak desentralistik. Tujuannya jelas, untuk lebih memberdayakan rakyat. Paradigma kekuasaan perlahan-lahan juga diubah menjadi paradigma kerakyatan. Oleh karena itu, wacana *civil society* menjadi makanan kita sehari-hari. Dan, derivatnya, seperti masalah demokrasi dan demokratisasi, pemberdayaan rakyat dan pemerintahan daerah, serta pemberdayaan masyarakat madani dan supremasi hukum, menjadi wacana yang sangat sentral.

## Menuju Jurusan PMI yang Berkualitas

Salah satu produk kebijakan politik ketatanegaraan untuk mewujudkan agenda di atas adalah dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Mengacu pada kedua undang-undang itu, setiap perguruan tinggi –yang berisi prodi-prodi-- bukan saja harus menyesuaikan diri, baik pada tataran visi, misi, dan kinerja, namun lebih dari itu pada tataran manajemennya.

Menurut saya, inilah salah satu persoalan strategis yang harus disadari benar oleh seluruh pengelola Program Studi PMI di IAIN/UIN. Kebijakan pemerintah di atas pada sejatinya memberi peluang kepada prodi-prodi (jurusan) untuk meningkatkan otonominya, baik berkenaan dengan otonomi keilmuan maupun kegiatan. Bahkan dalam hal tertentu, kebijakan itu dapat dipandang sebagai bahan baku dalam pembentukan 'sistem otonomi', sehingga kinerja dan kerjasama antara perguruan tinggi dengan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam wujud yang saling menguntungkan.

Bagi Jurusan PMI sendiri, sebagai jurusan yang sangat terbuka dan progresif, kebijakan itu memberi peluang yang sangat besar dan lebar dalam menentukan manajemen dan organisasi, menawarkan program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat, menerima mahasiswa, mengelola dosen dan staf administrasi, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta membangun kemitraan baik lokal, regional, nasional, maupun internasional dalam rangka pengembangan perguruan tinggi.

Konsekuensi logisnya, Program Studi PMI bukan saja dituntut untuk lebih

mengembangkan *visionary leadership*, mandiri dan produktif (efisien dan efektif), inovatif dan kreatif dalam melakukan *fund rising* dengan memanfaatkan peluang-peluang yang dikandung oleh otonomi daerah, tapi juga strategis dalam merespons tantangan-tantangan makro dan mikro yang baru dengan *me-review* kembali atau merekayasa atau bahkan *re-engineering* paradigma dan kinerja manajerialnya yang selama ini berjalan.

Untuk mencapai tujuan transformatif di atas, manajemen Program Studi PMI harus dimanaj secara profesional dengan pendekatan rekayasa transformatif (*transformative engineering*), juga operasinya harus benar-benar didasarkan pada paradigma-paradigma kesadaran dan paradigma-paradigma ilmiah yang berbasis *strategic responsiveness*.

Menurut saya, di zaman serbasulit seperti sekarang ini, hanya program studi yang gesit bermitra, beraliansi dan berkolaborasi saja yang akan bisa bertahan. Karena itu, di samping harus memperkuat diri ke dalam, Jurusan PMI juga –agar tetap *survive*-- harus terus-menerus secara gesit membangun kemitraan ke luar. Hanya dengan cara demikian, Jurusan PMI akan dirasakan kehadirannya, dirasakan pentingnya, dirasakan manfaatnya, dan dirasakan eksistensinya. Dan itulah yang saya maksud sebagai Jurusan PMI yang khas, cerdas, dan berkelas.

Sekedar contoh kecil, dalam beberapa tahun terakhir, Jurusan PMI pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung menjalin kerjasama untuk mendisain dan menggarap sejumlah kegiatan pengembangan sumberdaya

manusia dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beberapa kegiatan yang telah, tengah dan akan dilakukan bersama antara Jurusan PMI dengan Pemprov Jawa Barat, di antaranya adalah:

1. Penyusunan buku *Silabus Dakwah: Konteks dan Model Dakwah di Jawa Barat* (dengan Biro Yansos Setda Jabar)
2. Penyusunan buku *Implementasi Nilai-nilai Kesolehan Sosial* (dengan Biro Yansos Setda Jabar)
3. Penyusunan buku *Merawat Kerukunan di Tengah Keragaman: Ikhtiar Menuju Kesalehan Multikultural* (dengan Biro Yansos Setda Jabar)
4. Pembinaan Kerukunan Hidup Antarumat Beragama (rutin tiap tahun dengan Biro Yansos Setda Jabar)
5. Pembinaan Kerukunan Hidup Intraumat Islam (rutin tiap tahun dengan Biro Yansos Setda Jabar)
6. Kampanye Publik Kesalehan Sosial (rutin tiap tahun dengan Biro Yansos Setda Jabar)
7. Pelatihan Kader Dakwah Jawa Barat (rutin tiap tahun dengan Biro Yansos Setda Jabar)
8. Pembinaan Kader Penulis Muda Islam Jawa Barat (rutin tiap tahun dengan Biro Yansos Setda Jabar)
9. Pembinaan Mental Aparat PNSD Provinsi Jawa Barat Melalui Spiritual Islam (dimulai

pada Mei 2006 lalu, direncanakan rutin tiap tahun dengan Biro Kepegawaian Setda Jabar)

10. Pelatihan Motivasi Kerja PNSD Provinsi Jawa Barat (direncanakan rutin tiap tahun dengan Biro Kepegawaian Setda Jabar)
11. Pelatihan Dakwah Berwawasan Lingkungan untuk PNSD Jabar (dengan Biro Kepegawaian Setda Jabar)
12. Pembinaan Mental Calon Aparat (CPNSD) Provinsi Jawa Barat (dimulai pada bulan Juli 2006, dengan Biro kepegawaian Setda Jabar)
13. Dan lain-lain

#### Penutup:

##### Sebelum Menapak Dewasa

Menurut saya, semua yang dipaparkan di muka, pada sejatinya harus dimulai dari perubahan *mind set* di internal para pengelola program studi PMI (dan lainnya). Bagaimanapun, kebijakan otonomi pendidikan yang menyertai perubahan sistem ketatanegaraan kita tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti oleh perubahan mental dan cara berpikir baru dari para pengelola program studi. *Mind set* prodi yang, misalnya, paternalistik harus diubah menjadi partisipatif; *schooling* menjadi *learning*; *maintenance learning* menjadi *innovative learning*; dilayani menjadi melayani; alakadarnya menjadi profesional.

Ke arah itulah seharusnya Prodi PMI diarahkan.

